

**LAPORAN**  
**KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)**  
**TAHUN 2023**



**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**KABUPATEN BARITO TIMUR**

## DAFTAR ISI

	Kata Pengantar	Halaman
Bab I	Pendahuluan	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Tujuan Penulisan	2
	C. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
	D. Sistematika Penyajian LKIP	7
Bab II	Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	8
	A. Rencana Strategis Tahun 2018-2023	8
	B. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran	9
	C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	10
	D. Program dan Kegiatan yang Mendukung Perjanjian Kinerja	10
Bab III	Akuntabilitas Kinerja	13
	A. Indikator Kinerja	13
	B. Realisasi Anggaran	15
Bab IV	Penutup	18
LAMPIRAN		
	- Struktur Organisasi	

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018 - 2023 dan Penetapan Kinerja Tahun 2023. Penyusunan LKIP Tahun 2023 ini merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama Tahun 2023. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur merupakan hasil kinerja Tahun 2023 atau tahun terakhir dalam pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur tahun 2018 – 2023, disamping menyajikan faktor-faktor keberhasilan, juga memaparkan faktor-faktor yang menjadi kendala dan hambatan dalam bidang pengelolaan pendapatan daerah. Keberhasilan di bidang pendapatan ini tentunya bukan hanya keberhasilan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur semata, tetapi menggambarkan keberhasilan seluruh lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur, dukungan dunia usaha serta partisipasi masyarakat secara umum.

Mewujudkan pengelolaan pendapatan daerah yang amanah yang berorientasi kepuasan pelayanan publik merupakan Komitmen Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur. Secara umum pencapaian sasaran strategi melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan dalam mencapai misi dan tujuan sebagaimana tertuang dalam Renstra 2018 – 2023, meskipun masih ada beberapa indikator sasaran yang masih belum optimal. Untuk mewujudkan visi ditetapkan misi, tujuan dan sasaran. Dalam rencana kinerja dan perjanjian kinerja 2023 ditetapkan 2 sasaran strategis dengan 2 indikator kinerja sasaran yaitu :

1. Tercapainya nilai LAKIP Badan Pendapatan Daerah
2. Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah

Pada Tahun Anggaran 2023 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur mendapat alokasi anggaran sebesar Rp4.258.123.647,00,- dengan realisasi sebesar Rp3.998.704.606,- tercapai sebesar (93,91%).

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai pemegang mandat pengelola pendapatan daerah, dalam pelaksanaan peran dan fungsinya berorientasi pada peningkatan pelayanan, pengembangan dan Pembangunan sarana dan prasarana serta

peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang dimiliki dalam segala bidang guna menyiapkan kepuasan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut akan dicapai dengan menciptakan aktivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang efektif dan efisien, meningkatkan pendapatan daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi berkelanjutan, melanjutkan pembangunan sarana dan prasarana yang telah ada, meningkatkan kerjasama antara pemerintah, mitra kerja dan masyarakat, meningkatkan kinerja aparatur, menyusun perencanaan yang mampu menjawab permasalahan serta mengantisipasi peluang dan

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN BARITO TIMUR,**

**SUMA WARA MAHARATI,SE.M.Si**  
**Pembina Tingkat I (IV/b)**  
**NIP 19830303 201001 2 037**

**LAPORAN**  
**KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)**  
**TAHUN 2023**



**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**KABUPATEN BARITO TIMUR**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dimana setiap instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan bagian dari SAKIP, yang bertujuan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja yang diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan. Capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Daerah kabupaten Barito Timur. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme

(KKN). Penyusunan LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

#### B. Tujuan Penulisan

Maksud disusunnya LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022, ini adalah sebagai informasi laporan akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Daerah yang terwujud dalam tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai program dan kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian LKIP tahun 2023 ini bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Sehingga dapat menjadi acuan dalam upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur untuk meningkatkan kinerjanya.

#### C. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur dalam kedudukannya sebagai unsur pelaksana otonomi daerah Kabupaten Barito Timur di bidang pendapatan daerah memegang peranan penting dalam penyelenggaraan fasilitas pelaksanaan tugas pengelolaan pendapatan daerah dan pelayanan umum.

##### 1. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Timur nomor 51 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur, merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## 2. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Pendapatan Daerah bertugas melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pajak Daerah, Retribusi dan Pendapatan Lainnya. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah dalam urusan Pajak Daerah, Retribusi dan Pendapatan Lainnya;
- b. Perumusan bahan kebijakan pemerintah daerah dalam urusan pajak daerah, Retribusi, dan Pendapatan Lainnya;
- c. Penyiapan bahan kebijakan teknis, operasional kegiatan, rencana kegiatan, pembinaan, bimbingan, pengendalian, administrasi, dalam urusan pajak daerah, Retribusi dan Pendapatan Lainnya;
- d. Pelaksanaan penyelenggaraan Pajak Daerah, Retribusi dan Pendapatan Lainnya;
- e. Pelaksanaan pemantauan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dalam urusan Pajak Daerah, Retribusi dan Pendapatan Lainnya;
- f. Penyusunan Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam urusan Pajak Daerah, Retribusi dan Pendapatan Lainnya; dan
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas dalam urusan Pajak Daerah, Retribusi dan Pendapatan Lainnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## 3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur, maka susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah membawahkan :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris membawahkan :
  1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pajak Daerah, membawahkan :



1. Sub Bidang Pendataan dan Pelayanan;
  2. Sub Bidang Penetapan dan Penilaian;
  3. Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan.
- d. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya, membawahkan :
1. Sub Bidang Retribusi;
  2. Sub Bidang Lain-lain Pendapatan yang Sah;
  3. Sub Bidang Dana Transfer dan Pelaporan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut lampiran bagan struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur tahun 2023 : **(lampiran 1)**

#### 4. Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur didukung dengan sumber daya manusia dan anggaran dari sisi sumber daya manusia yang dapat dikatakan memiliki kualitas pegawai baik dan parameternya dapat dilihat dari pendidikan terakhir pegawai yaitu lulusan pasca sarjana (S-2) sebanyak 5 orang, sarjana (S-1) sebanyak 23 orang, Diploma (D-3) sebanyak 6 orang, Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 10 orang, Sekolah Menengah Pertama 1 orang.

Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur pada akhir bulan Desember tahun 2023 sebanyak 45 orang, yang terdiri dari ASN sebanyak 22 orang dan tenaga kontrak/honorar sebanyak 23 orang. Kondisi pegawai secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai  
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur  
per Desember 2023

B			
No	PEGAWAI	JUMLAH (ORANG)	%
1 a n	1. ASN	22	49
	2. KONTRAK/HONORER	23	51
	JUMLAH	55	100

Tabel diatas menunjukkan bahwa pegawai Badan Pendapatan Daerah masih banyak terdapat pegawai yang belum diangkat menjadi pegawai negeri (51%) yaitu tenaga honorer. Namun demikian penulisan tentang kondisi pegawai dibawah ini difokuskan hanya pada ASN yaitu sebanyak 22 orang (49%).

#### **A. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf**

Pengisian formasi jabatan struktural di Badan Pendapatan Daerah terdiri dari eselon II, III dan IV yaitu sebanyak 6 orang dan Jabatan Fungsional Umum 2 orang. Struktur jabatan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah yang Menduduki Jabatan dan Staf pada Bulan Desember Tahun 2023

<b>N0</b>	<b>Jabatan/Staf</b>	<b>Jumlah (orang)</b>	<b>%</b>
1.	Eselon II	1	5
2.	Eselon III	3	14
3.	Eselon IV	6	27
4.	JFT	2	9
5.	Staf di Badan Pendapatan Daerah	10	45
	Jumlah	22	100,00

#### **B. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/Pangkat**

Berdasarkan data dari 22 jumlah pegawai Negeri yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur, terdapat 5% pegawai Golongan IV, 33% pegawai Golongan III, 11% pegawai Golongan II dan serta tenaga kontrak sebanyak 51% dari jumlah pegawai Badan Pendapatan Daerah. Apabila dilihat dari golongan/pangkat, maka pegawai Negeri pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur didominasi oleh pegawai negeri sipil golongan III, yaitu sebesar 33%.

Oleh karena itu pola pembinaan dan pengarahan disesuaikan dengan kondisi mayoritas PNS golongan III. Selengkapnya gambaran mengenai jumlah PNS maupun tenaga kontrak berdasarkan golongan/pangkat dapat dilihat dalam Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur berdasarkan Golongan/Pangkat pada Bulan Desember Tahun 2023

<b>N0</b>	<b>GOLONGAN</b>	<b>JUMLAH (ORANG)</b>	<b>%</b>
1.	IV	2	5
2.	III	15	33
3.	II	5	11
4.	TKK	23	51
	Jumlah	45	100

### **C. Jumlah Pegawai berdasarkan Latar Belakang Pendidikan**

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan pegawai negeri pada Badan Pendapatan Daerah yang ada, maka komposisi pegawai dengan status pendidikan S1 lebih mendominasi yaitu sebesar 50%. Selengkapnya data latar belakang pendidikan pegawai Badan Pendapatan Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Timur Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan pada Bulan Desember Tahun 2023

<b>N0</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>Jumlah (orang)</b>	<b>%</b>
1.	Strata-2 ( S2 )	5	23
2.	Strata-1 ( S1 )	11	50
3.	Sarjana Muda/ D3	2	9
4.	SMA/SMK	4	18
	Jumlah	22	100

#### D. Sistematika Penyajian LKIP

Sistematika penyajian LKIP Badan Pendapatan Daerah tahun 2023 dapat diikhtisarkan berikut ini :

**Bab I Pendahuluan**, Memuat penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang dihadapi organisasi.

**Bab II Perencanaan Kinerja**, memuat ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

**Bab III Akuntabilitas Kinerja 2023**,

terdiri dari :

- A. Capaian Kinerja Organisasi, menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap perjanjian kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
- B. Realisasi Anggaran, yaitu menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

**Bab IV Penutup**, menyajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

**Lampiran – lampiran**

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis Tahun 2018-2023

Perencanaan Strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan kerkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini akan menghasilkan dokumen rencana strategis atau dokumen perencanaan suatu unit organisasi yang penyusunannya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari unit organisasi tersebut dan berjangka waktu 5 (lima) tahun.

Rencana strategis Badan Pendapatan Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 adalah dokumen perencanaan instansi untuk periode 5 (lima) tahunan merupakan penjabaran visi dan misi Bupati pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur yang dituangkan dalam strategi pembangunan daerah berupa kebijakan pendapatan dan belanja, program dan kegiatan pembangunan yang disertai dengan perencanaan penganggaran. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur mengemban visi dan misi Bupati terpilih. Visi Bupati Barito Timur yaitu “ **Terwujudnya Barito Timur Sehat, Cerdas dan Sejahtera Melalui Pemerintahan yang Amanah** “, sedangkan misi nya yaitu :

1. Meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui sektor pertanian, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, koperasi, UMKM, dan perluasan lapangan kerja;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana bidang kesehatan, pendidikan dan peningkatan Sumber Daya Manusia;
3. Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan, jembatan, pengairan, air bersih, listrik dan pariwisata yang berwawasan lingkungan;
4. Pembinaan umat beragama, adat, budaya, pemuda dan olahraga; dan
5. Meningkatkan pemerintahan yang baik, efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab.

Misi yang harus dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur ada pada misi 5 yaitu : “ **Meningkatkan pemerintahan yang baik, efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab.**”

**B. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran**

Dalam Perubahan Rencana Strategis 2018-2023 telah ditetapkan tujuan, sasaran dan indikator kinerja tujuan yang dijelaskan dalam tabel 1 di bawah ini :

Tabel 1  
Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Realisasi		Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-		
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah	Pengelolaan dan peningkatan pendapatan daerah	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	87,52	87,12	-	-	-
			Persentase peningkatan target pajak daerah	-	-	90	90	90
2	Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Peningkatan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	70	70	70	70	70

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR  
TAHUN 2023**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Metode/ Formulasi Perhitungan	Target Indikator Kinerja Utama	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
Pengelolaan dan peningkatan pendapatan daerah	Persentase penerimaan pendapatan daerah	$\frac{\text{Jumlah Penerimaan Pendapatan Daerah}}{\text{Target Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	90%	Laporan Realisasi Pendapatan Daerah	Bapenda
Peningkatan kualitas kinerja dan akuntabilitas	Tercapainya nilai LAKIP 70 poin	AA : 90 – 100 A : 80 – 90 BB : 70 – 80 B : 60 – 70 CC : 50 – 60 C : 30 – 50 D : < 50	70 poin	Orpeg Sekretariat Daerah Barito Timur	Inspektorat Kab. Barito Timur

### C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Akuntansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Perjanjian Kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renja dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 termuat didalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 dijelaskan dalam tabel 2.

Tabel 2

Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tercapainya nilai LAKIP Badan Pendapatan Daerah	70 poin
2	Meningkatnya hasil pengelolaan pendapatan daerah	Persentase penerimaan pendapatan daerah	90%

### D. Program dan Kegiatan yang Mendukung Perjanjian Kinerja

Kegiatan-kegiatan yang direncanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur pada Tahun 2023 menekankan pada bagaimana meningkatkan penerimaan pendapatan daerah yang berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak daerah dan retribusi daerah. Upaya-upaya tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur. Adapun program yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TAHUN 2023 terdiri dari 2 (dua) program, 8 (delapan) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan yaitu :

Tabel 3: Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur TA.2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU DPA 2023 (Rp)
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.952.458.731,00</b>
	a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.110.000,00
	Dengan sub Kegiatan sebagai berikut : • Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	21.110.000,00
	b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.328.181.026,00
	Dengan sub Kegiatan sebagai berikut : • Penyediaan gaji dan tunjangan ASN • Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN • Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2.043.151.126,00 272.910.000,00 12.119.900,00
	c. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	119.079.170,00
	Dengan sub Kegiatan sebagai berikut : • Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta penyusunan kebijakan retribusi daerah • Pendataan dan pendaftaran objek retribusi daerah • Pelaporan pengelolaan retribusi daerah	66.144.000,00 37.865.690,00 15.069.480,00
	d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	31.690.000,00
	Dengan sub Kegiatan sebagai berikut : e. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	31.690.000,00
	f. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	487.529.690,00
	Dengan sub Kegiatan sebagai berikut : • Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor • Penyediaan bahan logistik kantor • Penyediaan barang cetakan dan penggandaan • Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan • Fasilitasi kunjungan tamu • Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	224.819.510,00 15.181.000,00 47.335.300,00 3.600.000,00 21.500.000,00 175.093.000,00
	g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<b>416.700.000,00</b>
	Dengan sub Kegiatan sebagai berikut : • Penyediaan jasa surat menyurat • Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik • Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	3.000.000,00 82.200.000,00 331.500.000,00



<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>PAGU DPA 2023 (Rp)</b>
	h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<b>311.113.701,00</b>
	Dengan sub Kegiatan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</li> <li>• Pemeliharaan peralatan mesin dan lainnya</li> <li>• Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</li> </ul>	26.019.935,00 12.324.400,00 272.769.366,00
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>542.720.060,00</b>
	a. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	542.720.060,00
	Dengan sub Kegiatan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah</li> <li>• Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah</li> <li>• Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah</li> <li>• Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBPP) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)</li> <li>• Penetapan wajib pajak daerah</li> <li>• Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah</li> <li>• Penagihan pajak daerah</li> <li>• Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah</li> <li>• Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> </ul>	145.810.660,00 24.348.200,00 1.350.000,00 18.228.600,00 219.813.600,00 20.603.200,00 45.873.200,00 35.572.700,00 31.119.900,00
<b>JUMLAH</b>		<b>4.258.123.647,00</b>

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. INDIKATOR KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung jawaban secara periodik. Pengukuran kinerja adalah untuk menilai pencapaian secara kuantitatif setiap indikator kinerja sebagai bahan kontribusi bagi proses penilaian dan evaluasi atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kegiatan, kebijakan, tujuan, sasaran dan indikator kinerja. Tujuan lainnya adalah memberikan pemahaman bahwa pengukuran kinerja tidak hanya indicator output saja, tetapi juga outcome, manfaat dan dampak serta memberikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja yang lebih sistematis, terukur dan dapat diterapkan. Tabel di bawah ini menjelaskan pengukuran kinerja yang menunjukkan tingkat capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur.

Tabel 4

Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI (%)
1.	Pengelolaan dan peningkatan pendapatan daerah	Persentase penerimaan Pendapatan Asli Daerah	90%	94,47%
		Persentase penerimaan Pajak Daerah	90%	70,98%
2.	Peningkatan kualitas kinerja dan akuntabilitas	Nilai lakip	70 poin	51,47 poin

Dasar penghitungan capaian target indikator kinerja sasaran strategis dari perjanjian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur adalah penghitungan peningkatan pendapatan daerah kabupaten Barito Timur berikut ini :

Tabel 5  
Ringkasan Perhitungan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Barito Timur Tahun 2023

NO.	URAIAN PENERIMAAN	REALISASI 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2023 (%)
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>83.222.091.923,45</b>	<b>83.222.091.923,45</b>	<b>94,47</b>
	- Pajak Daerah	11.607.077.117,25	18.130.535.005,94	70,98
	- Retribusi Daerah	2.545.467.004,00	2.755.460.933,00	70,50
	- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.158.036.468,00	27.049.142,65	-
	- Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	54.911.511.334,20	52.161.725.844,33	108,89
<b>2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>880.187.448.086,29</b>	<b>920.767.042.130,13</b>	<b>103,15</b>
	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>831.225.924.065,00</b>	<b>859.947.338.885,00</b>	<b>102,12</b>
	Dana Perimbangan	752.445.141.065,00	752.445.141.065,00	108,13
	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	194.252.890.381,00	191.0687.002,46	113,04
	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum(DAU)	436.257.086.999,00	457.131.088.950,00	100,84
	- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	52.354.260.414,00	52.417.638.397,00	93,27
	- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	69.580.903.271,00	81.394.763.492,00	92,44
	Dana Insentif Daerah (DID)	4.984.971.000,00	-	-
	Dana Desa	73.795.812.000,00	77.935.147.800,00	103,18
	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>48.961.524.021,29</b>	<b>60.819.703.245,13</b>	<b>120,44</b>
	Bantuan Keuangan	48.961.524.021,29	60.819.703.245,13	120,44
	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	48.961.524.021,29	60.819.703.245,13	120,44
	Bantuan Keuangan Umum/DBH Pajak dari Pemerintah Provinsi		60.819.703.245,13	120,44
	Dana Bagi Hasil Pajak Rokok dari Provinsi		7.318.403.874,13	
	Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dari Provinsi		53.501.299.371,00	
<b>3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>2.091.025.027,00</b>	<b>2.091.025.027,00</b>	<b>94,62</b>
	Pendapatan Hibah	2.091.025.027,00	2.091.025.027,00	94,62
	- Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	-	-	-
	- Pendapatan Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	-	-	-
	- Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri	-	-	-
	- Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	2.091.025.027,00	-	-
	<b>TOTAL (1+2+3)</b>	<b>965.500.656.036,00</b>	<b>993.862.261.584,05</b>	<b>102,23</b>

Sumber : Laporan Pendapatan Daerah Per 31 Desember 2022 dan Per 31 Desember 2023 Badan  
Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur

## B. REALISASI ANGGARAN

Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur dibiayai dana APBD dengan jumlah anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 4.258.123.647,00 . Dalam penggunaannya di tahun 2023, anggaran belanja hanya terealisasi Rp. 3.998.704.606,00 atau sebesar 93,91% dari jumlah anggaran yang ada. Berikut rincian dari realisasi belanja langsung yang terdiri dari 2 (dua) program, 8 (delapan) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan di tahun 2023.

Tabel 6

### REALISASI KEUANGAN DAN FISIK APBD TA. 2023 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU DPA 2023 (Rp)	PAGU Setelah Perubahan 2023 (Rp)	REALISASI 2023	
				Rupiah (Rp)	%
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.029.009.912,00</b>	<b>3.715.403.587,00</b>	<b>3.461.770.083,00</b>	<b>93,17</b>
	a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.649.800,00	21.110.000,00	21.039.800,00	99,67
	Dengan sub Kegiatan sebagai berikut : • Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	15.649.800,00	21.110.000,00	21.039.800,00	99,67
	b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.328.181.026,00	2.328.181.026,00	2.093.054.377,00	89,90
	Dengan sub Kegiatan sebagai berikut : • Penyediaan gaji dan tunjangan ASN • Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN • Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2.043.151.126,00 272.910.000,00 12.119.900,00	2.043.151.126,00 272.910.000,00 12.119.900,00	1.809.034.677,00 271.900.000,00 12.119.700,00	88,54 99,63 100,00
	c. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	106.565.370,00	119.079.170,00	119.062.189,00	99,99
	Dengan sub Kegiatan sebagai berikut :				

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU DPA 2023 (Rp)	PAGU Setelah Perubahan 2023 (Rp)	REALISASI 2023	
				Rupiah (Rp)	%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Retribusi Daerah</li> <li>Pendataan dan pendaftaran objek retribusi daerah</li> <li>Pelaporan pengelolaan retribusi daerah</li> </ul>	53.630.200,00	66.144.000,00	66.129.000,00	99,98
		37.865.690,00	37.865.690,00	37.865.389,00	100,00
		15.069.480,00	15.069.480,00	15.067.800,00	99,99
	d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	227.300.015,00	487.529.690,00	486.797.514,00	99,85
	Dengan sub Kegiatan sebagai berikut :				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</li> <li>Penyediaan bahan logistik kantor</li> <li>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</li> <li>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</li> <li>Fasilitasi kunjungan tamu</li> <li>Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD</li> </ul>	39.976.775,00	224.819.510,00	224.597.567,00	99,90
		15.181.000	15.181.000,00	15.177.000,00	99,97
		47.335.300,00	47.335.300,00	46.856.750,00	98,99
		3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00
		13.625.000,00	21.500.000,00	21.475.000,00	99,88
		107.581.940,00	175.093.880,00	175.091.197,00	100,00
	e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.090.200.000,00	416.700.000,00	401.990.463,00	96,47
	Dengan sub Kegiatan sebagai berikut :				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan jasa surat menyurat</li> <li>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</li> <li>Penyediaan jasa pelayanan umum kantor</li> </ul>	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
		78.000.000,00	82.000.000,00	67.490.463,00	82,11
		1.009.200.000,00	331.500.000,00	331.500.000,00	100,00
	f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	261.113.701,00	311.113.701,00	309.829.100,00	99,59
	Dengan sub Kegiatan sebagai berikut :				

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU DPA 2023 (Rp)	PAGU Setelah Perubahan 2023 (Rp)	REALISASI 2023	
				Rupiah (Rp)	%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</li> <li>• Pemeliharaan peralatan mesin dan lainnya</li> <li>• Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</li> </ul>	26.019.935,00	26.019.935,00	25.366.600,00	97,49
		12.324.400,00	12.324.400,00	12.279.000,00	99,63
		222.769.366,00	272.769.366,00	272.183.500,00	99,79
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>557.216.200,00</b>	<b>542.720.060,00</b>	<b>536.934.523,00</b>	<b>98,93</b>
	a. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	<b>557.216.200,00</b>	<b>542.720.060,00</b>	<b>536.934.523,00</b>	<b>98,93</b>
	Dengan sub Kegiatan sebagai berikut :				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah</li> <li>• Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah</li> <li>• Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah</li> <li>• Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBPP) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)</li> <li>• Penetapan wajib pajak daerah</li> <li>• Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah</li> <li>• Penagihan pajak daerah</li> <li>• Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah</li> <li>• Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah</li> </ul>	135.306.700,00	145.810.660,00	141.731.373,00	97,20
		24.348.200,00	24.348.200,00	24.245.000,00	99,58
		26.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	100,00
		18.228.600,00	18.228.600,00	18.172.000,00	99,96
		219.813.600,00	219.813.600,00	218.440.000,00	99,38
		20.603.200,00	20.603.200,00	20.596.000,00	99,97
		45.873.200,00	45.873.200,00	45.873.200,00	100,00
		35.572.700,00	35.572.700,00	35.527.050,00	99,87
		31.120.000,00	31.119.900,00	30.999.900,00	99,61
<b>JUMLAH</b>		<b>4.586.226.112,00</b>	<b>4.258.123.647,00</b>	<b>3.998.704.606,00</b>	<b>93,91</b>

## BAB IV

### P E N U T U P

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur tahun 2023 hampir memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini terlihat jelas dari penerimaan Pendapatan Daerah sebesar Rp.993.862.261.584,05 dari target yang ditetapkan sebesar Rp.972.196.758.202,00 atau mencapai 102,23%.

#### B. UPAYA YANG DILAKUKAN DI TAHUN YANG AKAN DATANG

Dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur diperlukan langkah-langkah dan upaya sebagai berikut:

- a) Membenahi dan melengkapi sarana dan prasarana perkantoran secara bertahap dan berkelanjutan.
- b) Memenuhi dan meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia melalui pelatihan dan workshop yang bersifat spesialis.
- c) Mengoptimalkan pemakaian Informasi Teknologi (IT) agar pengelolaan Pendapatan Daerah dan Pelayanan kepada masyarakat dapat maksimal.
- d) Mendorong tingkat kepatuhan Wajib Pajak melalui kegiatan penagihan pajak.
- e) Dukungan regulasi dan kebijakan dari pemerintah daerah dalam upaya-upaya peningkatan pendapatan daerah.
- f) Peningkatan kualitas dan kuantitas koordinasi antar instansi terkait dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.

Tamiang Layang,        Februari 2024

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN BARITO TIMUR,**

**SUMA WARA MAHARATI,SE.,M.Si**  
**Pembina Tingkat I (IV/b)**  
**NIP.19830303 201001 2 037**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR

